

**Kode/Rumpun Ilmu : 612/Sosiologi**  
**Bidang Fokus: Sosial Humaniora**

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**DOSEN PENELITI PEMULA**



**POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILIHAN KEPALA**  
**DAERAH DI PROVINSI GORONTALO**

**TIM PENGUSUL**

**Apris Ara Tilome, S.Ag., M.Si / 0916017402)**  
**Nuzlan Botutihe, SE, M.Si / 0909087903**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO**  
**Juni 2017**

#### HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Politik Transaksional Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo

**Peneliti/Pelaksana**  
Nama Lengkap : APRIS ARA TILOME, S.Ag, M.Si  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Gorontalo  
NIDN : 0916017402  
Jabatan Fungsional : Tidak Punya  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Nomor HP : -  
Alamat surel (e-mail) : apristolome@yahoo.com

**Anggota (1)**  
Nama Lengkap : NUZLAN BOTUTIHE M.Si  
NIDN : 0909087903  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

**Institusi Mitra (jika ada)**  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 20,000,000  
Biaya Keseluruhan : Rp 20,000,000

Mengetahui,  
Ketua LPPM



(Dr. Hj. Yuzda K. Salimi, M.Si)  
NIP/NIK 1150274

GORONTALO, 22 - 09 - 2018  
Ketua,



( APRIS ARA TILOME, S.Ag, M.Si)  
NIP/NIK 0916017402

## **RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Politik Transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Gorontalo. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu mengapa terjadi transaksi politik di kalangan Elit Partai (aktor Politik), Bagaimana pengaruhnya terhadap pengurus partai dalam menentukan pilihan pada calon kepala daerah serta bagaimana dampak sosiologis dari transaksi politik terhadap pemilih. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif survey dengan pendekatan kualitatif dan dengan teknik analisis korelasi. Pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa ada pengaruh secara signifikan antara pengaruh politik transaksional terhadap perilaku pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah.

***Kata kunci: Politik Transaksional, Elit Partai, Elit Politik***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.2 Latar Belakang**

Fenomena pertukaran sosial elit politik dalam pemilihan kepala daerah penulis awali dengan mengajukan hasil riset LSI dan SMRC (2011); Indikator Politik (2013) yang menemukan bahwa tingginya biaya politik disebabkan baik pasangan calon kepala daerah dan calon anggota legislatif maupun konstituen hanya membangun hubungan politik jangka pendek (pragmatis) dengan partai politik ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 12 Desember 2013).

Relevansi temuan riset beberapa lembaga survei di atas mengindikasikan bahwa aras kiblat perpolitikan di Indonesia hingga saat ini masih belum beranjak dari persoalan perebutan kekuasaan. Sistem politik yang seharusnya mengartikulasikan kepentingan rakyat hanya menjadi sarana pencapaian tujuan kelompok-kelompok kepentingan. Oleh karena itu, pertukaran sosial elit politik masih menjadi momok sekaligus borok dalam perpolitikan di tanah air. Politik transaksional dan segala aspek-aspek keuangan yang menyertainya selanjutnya dikemas dalam terminologi yang lebih santun sebagai anggaran politik (*political cost*) juga populer sebagai *political budget cycle* (Rogoff, 1987; Blais & Nadeau, 1992; Gonzales, 2002; Brender & Drazen, 2004; Shi & Svensson, 2006) dimana semua anggaran yang terkait dengan pembiayaan politik dianggap rasional dalam proses berdemokrasi.

Selain penelitian-penelitian dalam konteks global di atas, tema politik transaksional sudah banyak mendapat perhatian para peneliti nasional dan lokal, sebut saja misalnya Hidayat, dkk (2007) membedah relasi kekuasaan elit di tingkat lokal antara pengusaha, penguasa, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca pilkada menemukan apa yang disebutnya sebagai praktik oligarki kekuasaan. Menurutnya, basis konstruksi oligarkhi kekuasaan itu bervariasi berlandaskan pada kekuatan partai politik, ikatan kekerabatan, ikatan kesukuan, dan hubungan keluarga. Praktik oligarkhi kekuasaan

itu relatif berjalan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena ditopang oleh keberadaan *shadow political* dan *business manager* yang berperan sebagai aktor penghubung antara pejabat daerah dengan masyarakat pada umumnya dan kepada para pengusaha pada khususnya.

Muhtadi (2013) tentang politik uang dan dinamika elektoral memaparkan maraknya politik uang disebabkan dua hal pokok, yakni: Pertama, minimnya kedekatan pemilih terhadap partai politik. Kedua, buruknya kinerja partai politik di mata masyarakat karena banyaknya kader partai terlibat kasus korupsi. Disisi lain, Razaqtiar (2015) menelaah peran partai politik pada pemilihan kepala daerah. Pada kasus Pilkada Kabupaten Karanganyar tahun 2013 disimpulkan bahwa kemenangan pasangan calon kepala daerah tidak saja ditentukan oleh popularitas pasangan calon kepala daerah, partai politik memiliki andil penting bukan saja sebagai kendaraan politik melainkan juga sebagai sarana mempertemukan sejumlah gagasan strategis untuk menaikkan rating keterpilihan calon kepala daerah.

Demikian halnya hasil riset kuantitatif yang dilakukan Indora, Suntoro, dan Nurmalisa (2014) yang menemukan bahwa ada pengaruh signifikan antara pengaruh politik transaksional terhadap perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Begitu juga temuan disertasi doktoral Rachim (2017) bertema politik transaksional di Kota Makassar menjelaskan bahwa kedekatan aktor politik dengan sejumlah pejabat daerah cukup memengaruhi tingkat keterpilihan calon anggota legislatif.

Temuan riset-riset terdahulu tersebut pada prinsipnya cukup menjelaskan jika proses berdemokrasi saat ini masih membuka ruang seluas-luasnya terhadap praktik pertukaran sosial elit politik. Fenomena ini sekaligus menyuburkan praktik petronase dan klientelisme dalam demokrasi. Petronase dimaknai sebagai bentuk distribusi materi atau keuntungan politik yang dilakukan oleh politisi kepada konstituennya, sedangkan klientelisme adalah karakter relasi antara politisi dengan konstituennya (Aspinall dan Sukmajati, 2015:4).

Secara substantif, penelitian terdahulu bertema pertukaran sosial elit politik dapat dikelompokkan pada dua pola kajian, yakni: Pertama, peneliti menguraikan peran penting politik transaksional untuk menopang kekuatan figur calon kepala daerah, calon anggota legislatif maupun *voters* serta partai politik adalah suatu keadaan yang saling bergantung dan sama-sama saling menguntungkan. Kedua, politik transaksional sebagai momok dan borok yang menggerogoti sistem demokrasi karena hanya melanggengkan hubungan pragmatis setiap elemen yang terkait dengan penyelenggaraan proses politik (calon kepala daerah/calon legislatif, konstituen, dan partai politik). Alhasil, pengartikulasian kepentingan rakyat terkalahkan oleh kepentingan elit dan kelompok kepentingan secara terbatas. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa realitas ontologis penelitian-penelitian terdahulu itu masih bertumpu pada paradigma klasik sosiologi politik, semata terbatas pada masalah relasi patron-klien.

Berbeda dengan penelitian ini yang hendak menjelajahi ruang postruktural dan postmaterial, berfokus pada unsur-unsur dibalik realitas pertukaran sosial elit politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Unsur-unsur dibalik realitas sebagai objek ontologi (*area of knowledge*) tidak saja untuk mengidentifikasi pertukaran sosial elit politik secara tematik melainkan bagaimana pertukaran sosial itu bekerja, dikonstruksikan, atau dioperasionalkan dibalik realitas yang tampak saja. Pertukaran sosial elit politik, pemilih, dan partai politik sebagai manifestasi pencapaian tujuan pragmatis yang menciderai sistem pemilihan umum bukan sebagai suatu gejala yang alamiah melainkan representasi kompleksnya multi kepentingan politik.

Kebaruan ontologis (*state of the art*) penelitian ini diperkuat oleh fakta sosiologis bahwa proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk di Provinsi Gorontalo tahun 2017 masih diwarnai oleh adanya pertukaran sosial elit politik. Fenomena politik transaksional di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango sebagai lokus penelitian bahkan lebih menarik untuk ditelaah. Misalnya, pemilihan gubernur tahun 2017 yang dimenangkan oleh Rusli Habibie dan Idris Rahim sebagai

kader Partai Amanat Nasional justru meraih kemenangan melalui Partai Golkar, karena Partai Amanat Nasional memberikan rekomendasi kepada pasangan calon non kader. Di Kabupaten Gorontalo, pemilihan kepala daerah dimenangkan oleh pasangan calon dari kalangan kader partai politik. Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango yang merupakan basis Partai Persatuan Indonesia memberikan rekomendasi kepada non kader tetapi mengalami kekalahan.

Teranyar, jejak praktik pertukaran sosial elit politik dapat dicermati dari konflik internal Partai Hanura akibat dana 200 miliar diendapkan salah satu kader sebagai hasil dari mahar-mahar politik para kandidat kepala daerah yang didukung Partai Hanura untuk Pilkada 2018 (Media Indonesia, 24 Januari 2018). Setali tiga uang, mencuat aksi buka suara La Nyalla untuk melawan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena tingginya permintaan mahar politik dan kegagalannya untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Jawa Timur tahun 2018 ([www.detik.com](http://www.detik.com), 11 Januari 2018).

Lihat pula kasus-kasus yang mendera sederet kepala daerah misalnya Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara); Zumi Zola (Gubernur Jambi); Abdul Latif (Bupati Hulu Sungai Tengah); Nyono Suharli Wihandoko (Bupati Jombang); Marianus Sae (Bupati Ngada); Imas Aryuningsih (Bupati Subang); Mustafa (Bupati Lampung Tengah) dan Gunadi Ibrahim (Ketua DPD Gerindra Lampung); Mohammad Yahya Fuad (Bupati Kebumen); Samanhudi Anwar (Bupati Blitar); Dirwan Mahmud (Bupati Bengkulu Selatan); Abu Bakar (Bupati Bandung Barat); Rudi Irawan (Bupati Halmahera Timur); Samsu Umar Samiun (Bupati Buton); Asrun (Mantan Walikota Kendari dan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara); Adriatma Dwi Putra (Walikota Kendari); Agus Faisal (Bupati Buton Selatan) yang terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap/gratifikasi pengadaan barang dan jasa maupun kaitannya dengan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dari sejumlah sponsor (pengusaha) yang mengharapkan jatah proyek tertentu pasca memenangkan pemilihan kepada daerah ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), 17 Mei 2018; [www.detik.com](http://www.detik.com), 4 Juni 2018; [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 16

Mei 2018; [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), 25 Mei 2018; [www.tempo.com](http://www.tempo.com), 24 Mei 2018; [www.wartasultra.id](http://www.wartasultra.id), 22 Juni 2018; [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), 21 Juni 2018).

Tidak dapat disangkal bahwa sistem politik dan demokrasi di Indonesia saat ini masih menciptakan politik transaksional dengan biaya tinggi. Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra) yang digadang-gadang akan mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2019 akan datang bahkan mengeluhkan hal serupa ([www.merdeka.com](http://www.merdeka.com), 23 Juni 2018).

Politik transaksional cakupannya sangat luas, bisa menyentuh seluruh aktivitas politik. Baik pada pemilihan Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati bahkan sampai ditingkat kepala Desa memerlukan transaksi politik. Biaya yang dikeluarkan saat Pilpres maupun Pemilukada menjadi beban yang harus dikembalikan saat seseorang telah memperoleh kekuasaan.

Persaingan antar partai politik membuat masing-masing calon penguasa berusaha sekuat tenaga menebar pengaruh pada publik untuk mendapat dukungan Partai. Tindakan ini sejatinya menyuburkan *money politic* di kalangan elit partai dan dapat mempengaruhi demokratisasi pemilihan kepala daerah.

Dalam perspektif sosiologi politik, dapat dipastikan ada pertukaran sosial politik oleh elit politik dengan pemilih. Realitas politik memang meniscayakan sikap saling ketergantungan dan saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) antara patron-klien. Uang yang awalnya merupakan alat transaksi ekonomi bertransformasi menjadi alat yang efektif untuk memperoleh keuntungan non ekonomi kursi kekuasaan. Tampak jelas bahwa calon kepala daerah sulit mendapat dukungan jika tidak disertai uang. Uang digunakan bukan saja untuk mendapat dukungan dari konstituen tetapi juga untuk mengikat dukungan konstituen. Dengan demikian, pertukaran sosial elit politik sesungguhnya mencerminkan ekspresi budaya, hasil konstruksi sosial masyarakat yang membentuk satu mata rantai penting antara peristiwa-peristiwa politik dengan perilaku-



perilaku individual dalam memberikan reaksi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut (lihat Gaffar, 1989:79).

Pada dasarnya politik adalah kompromi atau *sharing* kekuasaan. Hal ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga diseluruh dunia yang menganut sistem demokrasi. Politik adalah proses pembagian kekuasaan, dimana seseorang atau sekelompok orang yang meraih kekuasaan akan berbagi kekuasaan dengan orang lain.

Biasanya, pembagian kekuasaan tersebut berkaitan dengan koalisi politik yang sebelumnya dibangun. Koalisi inilah yang memungkinkan adanya pertukaran sosial elit politik. Sebelum koalisi dibangun, maka pertukaran elit politik itu harus sudah disepakati. Jika dalam pelaksanaannya ada pengkhianatan, maka kesepakatan politik itu bisa dievaluasi atau tidak dilakukan sama sekali. Yang menarik dari peneliti adalah pertukaran sosial dalam elit politik dikalangan elit partai yang tidak mempertimbangkan etika politik dalam menentukan calon kepala daerah. Di Gorontalo adalah Ketua Partai politik A menjual partainya kepada calon kepala daerah yang tidak memiliki partai, dan pemilik partai mencalonkan diri dengan partai lain yang memenuhi syarat dalam pencalonan kepala daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pertukaran sosial dalam proses politik adalah niscaya. Dalam setiap momentum pemilihan umum, elit, voters, dan partai politik senantiasa berada dalam situasi strategis, saling bergantung, saling membutuhkan, dan tentu saja saling menguntungkan. Pertukaran sosial itu ada kalanya bahkan umumnya bersifat pragmatis untuk tujuan sesaat. Ada banyak kasus dimana calon kepala daerah bukan kader partai politik, demikian halnya partai politik sekadar menjadi kendaraan politik calon kepala daerah, sementara *voters* tidak punya kedekatan hubungan dengan partai politik.

Fenomena pertukaran sosial elit politik dan makna di balik realitasnya menarik untuk dikaji. Sebagai contoh misalnya, ketika partai A memberikan rekomendasi kepada

pasangan calon kepala daerah non kader dan kadernya sendiri mendapatkan rekomendasi dari partai lain, hal ini tentu saja menyiratkan kebermaknaan pertukaran sosial elit sebagai konsolidasi politik untuk mencapai tujuan politis yakni kemenangan.

Konsepsi permasalahan di atas selanjutnya direlevansikan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi pertukaran sosial elit politik pemilihan calon kepala daerah?
2. Bagaimana pola pertukaran sosial elit politik, partai politik, dan masyarakat sebagai pemilih?
3. Bagaimana strategi pertukaran sosial elit politik dimaksimalkan untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan calon kepala daerah?
4. Bagaimana implikasi sosiologis pertukaran sosial terhadap interaksi sosial pasca pemilihan calon kepala daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian bermaksud untuk mengetahui proses, makna, dan implikasi relasi dan pola pertukaran sosial elit politik, partai politik dan masyarakat pemilih serta bagaimana strategi pertukaran sosial itu dimaksimalkan. Oleh karena itu, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami relasi pertukaran sosial politik elit politik pemilihan kepala daerah.
2. Menjelaskan pola pertukaran sosial elit politik, partai politik, dan masyarakat sebagai pemilih.
3. Mengurai strategi pertukaran sosial elit politik dimaksimalkan untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan calon kepala daerah.
4. Menjelaskan implikasi sosiologis pertukaran sosial terhadap interaksi sosial pasca pemilihan kepala daerah.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian senantiasa memiliki tujuan, yakni mencari atau menemukan sejumlah jawaban faktual, bersifat empiris, dan dapat diterima logika ilmiah melalui cara-cara yang terencana, sistematis, serta dapat diukur dengan melakukan penelusuran kembali terhadap realitasnya di lapangan. Oleh karena itu, permasalahan yang telah dikemukakan sebelum ini pada prinsipnya bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan menambah khasanah kepustakaan yang berkenaan dengan praktik politik transaksional yang marak terjadi pada penentuan calon kepala daerah.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi elit politik dan aktor partai politik dalam proses rekrutmen politik calon kepala daerah.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis dalam merespons praktik pertukaran sosial dalam elit politik untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan calon kepala daerah.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk menjelaskan fenomena pertukaran sosial elit politik sebagai permasalahan pokok dalam penelitian ini, selanjutnya akan diketengahkan dua tematika teoritik yakni: Pertama, tinjauan tentang artikulasi kekuasaan dalam kehidupan sosial khususnya konsep kekuasaan Michel Foucault dan akan dielaborasi baik secara parsial maupun komprehensif pada hal-hal memiliki pertautan yang kuat dengan kontestasi pemilihan kepala daerah pada lokus penelitian. Kedua, menelaah keragaman partisipasi politik dan sistem perekrutan politik termasuk di dalamnya biaya politik sebagai landasan konseptual hasil penelitian. Ketiga, mendalami perspektif pertukaran sosial sebagai kerangka teoritis utama penelitian ini.

### **2.1 Artikulasi Kekuasaan dalam Kehidupan Sosial**

Titik sentral studi sosiologi berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam satu konteks kehidupan bermasyarakat. Jika asumsi ini disepakati, maka menjadi penting untuk menerapkan studi politik dalam kaitan kekuasaan pada konteks kehidupan masyarakat yang sama. Oleh karena itu, persinggungan antara studi sosiologi dan studi politik berada pada domain kajian yang sama, yakni tentang kekuasaan sosial.

Membicarakan kekuasaan dalam konteks kehidupan sosial akan lebih bermakna jika menjelajahi gagasan mengenai kekuasaan para filsuf ternama abad pertengahan seperti misalnya Thomas Aquinas, Thomas Hobbes, Karl Marx, atau Max Weber. Bagi Aquinas, kekuasaan hanyalah suatu kenyataan fisik dan sosial tetapi tidak memuat suatu wewenang. Menurutnya, tidak ada seseorang manusia yang secara alami mempunyai wewenang atas manusia lain, karena yang berwenang atas kekuasaan itu hanyalah Tuhan (Suseno, 1986:6).

Berdasarkan hal tersebut, Aquinas secara radikal menuntut legitimasi etis penggunaan kekuasaan oleh manusia. Inti pemikiran Aquinas adalah kekuasaan pada pokoknya hanya benar dan baik sejauh berjalan dengan dalam batas-batas hukum yang

presisi (tepat/akurat), sedangkan hukum sendiri harus menunjang tujuan negara, yaitu mengusahakan kesejahteraan umum dan bukan kepentingan pribadi penguasa atau kelompok tertentu. Makna kekuasaan tersebut sangat berbeda dengan pandangan Hobbes yang meletakkan kekuasaan sebagai kekuatan institusional yang bersifat formal dari negara dengan menerapkan manipulasi psikologis berupa ancaman dan ketakutan. Bagi Hobbes, negara harus kuat tanpa tanding sehingga dapat memastikan, seperlunya memaksakan masyarakat untuk taat pada peraturan dan negara wajib menetapkan tatanan hukumnya. Demikian halnya pandangan Marxisme dimana kekuasaan sebagai properti kepemilikan yang dapat dikuasai oleh satu orang atau kelompok tertentu untuk melemahkan orang lain atau kelompok tertentu, bahkan pandangan kaum Weberian yang hanya membatasi kekuasaan itu sebagai kemampuan subyektif aktor untuk mendominasi aktor lain.

Gordin dan Klingemann (Ahmad, 2012:15) mendefinisikan politik sebagai penggunaan kekuasaan sosial (*social power*) yang dilakukan secara terbatas. Hal ini tak lain karena eksistensi kekuasaan hadir dalam kehidupan sosial dan keberadaannya juga terkait dengan legitimasi sosial dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan sosial dalam hal ini tidak bersifat absolut, namun ada beragam batasan dari kekuasaan lainnya yang selalu hadir secara bersamaan dan tak terhindarkan. Defenisi paling mendekati makna kekuasaan Foucault yang mengartikulasikan bahwa kekuasaan itu tersebar, tidak dapat dilokalisasi, sebagai sebuah tatanan yang dihubungkan dengan jaringan-jaringan (*networks*), ditandai adanya struktur kegiatan-kegiatan yang produktif tidak represif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui (Haryatmoko, 2002:37).

Dalam kaitan ketidakseimbangan perolehan imbalan di antara dua orang yang melakukan pertukaran sosial, Homans mengemukakan konsep kekuasaan (*power*) sebagai kemampuan mengendalikan imbalan atau hukuman dalam suatu pertukaran sosial. Seorang yang memiliki kekuasaan atau penguasa berarti ia mampu membuat pihak yang dikuasai melakukan apa pun yang dikehendaknya. Karena pihak yang dikuasai tidak

mempunyai kemampuan untuk memberikan baik imbalan maupun hukuman kepada pihak penguasa. Kemampuan untuk memberikan imbalan atau sanksi yang dimiliki oleh penguasa, dampaknya sama saja bagi pihak yang dikuasai, yakni posisi yang dikuasai bergantung pada penguasa.

Kontekstualisasi pertukaran sosial elit politik dalam pemilihan umum kepala daerah sebagai tematika utama penelitian ini memaknai bahwa kekuasaan itu menyebar sebagai suatu bentuk situasi strategis yang kompleks dalam jalinan relasi sosial yang tengah berlangsung. Foucault (Adil, 2016:19) menyebutkan lima proposisi kekuasaan yang diuraikannya sebagai berikut:

1. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi hirarki struktural yang mengandaikan ada yang menguasai dan ada yang dikuasai.
3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary oppositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
4. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subyektif.
5. Dimana ada kekuasaan, disitu pula ada anti kekuasaan (*resistance*), dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang dalam kekuasaan, tidak ada satu jalanpun untuk keluar darinya.

Kelima proposisi Foucault di atas menunjukkan betapa kekuasaan merupakan kompleksitas bentuk dari situasi yang strategis, dan untuk memahami kompleksitas kekuasaan yang berelasi seperti jaringan itu pula ia mengajukan lima pendekatan (Upe, 2016:19), yakni:

1. Desentralisasi analisis kekuasaan, yaitu menolak bentuk kekuasaan sentralistik. Tujuannya untuk melihat eksremitas kekuasaan dan pelbagai teknik materil mengintervensi kehidupan.

2. Mengamati kekuasaan secara eksternal dengan mendekatkannya pada kajian-kajian empiris dimana lokasi yang bentuk-bentuk kekuasaannya memiliki efek.
3. Tidak menganggap kekuasaan sebagai hak kepemilikan (*property right*), melainkan sebagai sebuah jaringan yang melibatkan individu sebagai subyek dan objek kekuasaan.
4. Kekuasaan tidak bekerja dari atas ke bawah (*top down*) tetapi dari bawah ke atas (*bottom up*).
5. Tidak memulai dengan ideologi dan mengeksplorasi instrument apa yang digunakan, tetapi memulai dengan mekanisme dan praktik-praktik, serta menjelajahi bagaimana aktor membentuk ideologi dan pengetahuan.

Mencermati kelima pendekatan di atas, maka dapat dipahami bahwa kekuasaan tidaklah beroperasi secara negatif sebagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan penekanan/penindasan kepada individu. Kekuasaan dalam konteks ini beroperasi secara positif dan produktif, walaupun wujud kekuasaan itu tidaklah nampak dan tidak disadari/dirasakan sebagai praktik-praktik yang mengendalikan individu itu, tetapi efek-efek dari praktik kekuasaan itu dapat diketahui.

## **2.2 Pengrekrutan Politik dan Biaya Politik**

Manusia sebagai *zon politicon* (Aristoteles) atau *homo homini socius* (Adam Smith) adalah makhluk bermasyarakat (sosial). Manusia sebagai makhluk bermasyarakat berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi hajat hidupnya. Manusia sebagai makhluk bermasyarakat memiliki sejumlah penciri yang khas, berbeda satu dengan lainnya seperti misalnya fisik, bakat, emosi, kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku dan lain sebagainya yang kesemua hal itu memicu lahirnya tumbukan antar kepentingan. Perbedaan-perbedaan itu pula yang senantiasa menempatkan masyarakat dalam situasi penuh konflik. Artikulasi kebutuhan individu maupun kolektif pada dasarnya membutuhkan kompetisi, baik itu yang sifatnya individual (*private needs*) maupun publik (*public needs*). Kebutuhan individual sangat dipengaruhi oleh kearah mana kebutuhan publik

terpenuhi, sebab akan sangat sulit memenuhi kebutuhan individu jika kebutuhan publik tidak tersedia. Untuk menghindari munculnya tumbukan kepentingan dibutuhkan upaya-upaya sadar dan kolektif guna tercipta keteraturan, dan keteraturan itu pada dasarnya hanya bisa diwujudkan melalui politik.

Politik dimaknai secara beragam oleh para ahli. Tidak ada satu konsensus yang disepakati. Politik dapat diartikulasikan sebagai pembagian kekuasaan (*sharing power*), dapat juga dimaknai sebagai usaha mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, atau politik itu tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana ia didapatkan. Yang pasti, politik itu melingkupi semua aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan.

Menurut Rush dan Althoff (2013:128) partisipasi politik itu bersifat luas. Dalam masyarakat primitif, dimana politik erat terintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, partisipasi condong tinggi dan mungkin sulit untuk dibedakan dari kegiatan lainnya. Akan tetapi, dalam masyarakat berkembang, karena adanya kombinasi dan institusi dan pengaruh modern dan tradisional, partisipasi mungkin dibatasi faktor-faktor seperti tingkatan melek huruf dan masalah umum dari komunikasi. Berlawanan dengan hal ini ialah partisipasi politik dalam masyarakat totaliter, dalam beberapa bentuk partisipasi mungkin sangat tinggi, dan lainnya mungkin sangat rendah.

Institusi politik, kelembagaan politik dan sistem politik mutlak dibutuhkan dalam berdemokrasi. Menurut Ahmad (1992:28), yang dimaksud institusi politik merupakan institusi yang tercipta dalam kehidupan publik yang menciptakan aturan main (*rule of game*) yang disepakati baik secara formal maupun informal dalam interaksi kehidupan masyarakat. Institusi politik memiliki sejumlah peran penting antara lain: *Pertama*, menentukan siapakah para aktor politik yang memiliki legitimasi politik. *Kedua*, menentukan bagaimana ragam dan jumlah aktor yang berkembang dalam kelembagaan politik dan sistem politik. *Ketiga*, menjadi referensi dan panduan bagaimana kecenderungan perilaku aktor politik. *Keempat*, menentukan bagaimana kecenderungan



informasi politik yang akan dan hendak dimiliki dan dibutuhkan oleh para aktor politik terhadap institusi politik lainnya. *Kelima*, menentukan bagaimana logika kelayakan (*logic of appropriateness*) dari perilaku aktor politik dalam situasi tertentu.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar adalah salah satu contoh negara demokrasi yang sistem politiknya diwarnai oleh beragam partisipasi politik. Melalui sistem politik yang membagi kewenangan/kekuasaan dalam tiga kategori kelembagaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), ketiga lembaga ini tidak serta merta menjadi pemain utama. Di panggung media sosial, partisipasi politik masyarakat (yang terlembaga maupun tidak) sangat terasa dengan munculnya sentimen-sentimen politik yang bertumpu pada isu-isu peran dan kontribusi partai politik, ajaran agama yang dikemas sedemikian rupa menjadi komoditas politik, maupun fanatisme pada figur elit politik tertentu untuk tingkat nasional, figur Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto misalnya. Imbasnya, partisipasi politik itu kian sporadis tetapi frontal jauh sebelum masa suksesi dan kontestasi kepemimpinan nasional. Maka lihatlah bagaimana dampak aksi bela agama 212 yang lalu ikut memengaruhi tatanan politik di negeri ini.

Sistem perekrutan politik untuk jabatan politik di pelbagai negara yang menganut demokrasi memiliki tingkat keberagaman yang berbeda-beda. Di Indonesia, sistem rekrutmen politik oleh partai politik dilaksanakan dalam rangka untuk menjaring calon anggota partai, bakal calon anggota legislatif daerah dan pusat, bakal calon kepala daerah (gubernur; bupati; wali kota), serta bakal calon presiden dan wakil presiden (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008). Dalam konteks ini partai politik merupakan sarana pendidikan politik bukan saja bagi anggotanya tetapi juga masyarakat pada umumnya dalam rangka penyerapan dan penyaluran aspirasi politik masyarakat untuk mengikat kebijakan-kebijakan politik yang dijalankan negara.

Perekrutan politik merupakan suatu proses pertahanan sistem yang dilembagakan secara parsial. Marvick (2008) mengemukakan bahwa kesempatan-kesempatan dalam politik hampir tidak terhindarkan ditandai dengan unsur-unsur

koopasi. Menurutnya, para aspiran karir politik melintasi ambang batas yang tidak bertepi ketika mereka diperhatikan secara serius dalam menangani pekerjaan tertentu oleh mereka yang mengontrol sumber-sumber daya politik yang penting untuk mendapatkannya dan mempertahankannya. Pada akhirnya, proses perekrutan politik itu berdampak kurang memberikan banyak pengaruh antar pribadi, tetapi ketika pengaruh-pengaruh seperti itu datang ketika seseorang dapat menunjukkan kecakapan tertentu, bisa menggalang pengikut, bisa menyertakan pengetahuan yang dimilikinya atau sebaliknya mempengaruhi kolega-koleganya. Maknanya, rekrutmen politik tersebut didasarkan pada integritas dan kapabilitas personal.

Perekrutan politik bukan saja berkonsekuensi pada mekanisme politik melainkan juga pada aspek ekonomi. Realitasnya, perekrutan politik sulit terlaksana tanpa kontribusi ekonomi calon yang direkrut, khususnya calon kepala daerah. Semakin besar kontribusi ekonomi yang diberikan kepada partai politik akan semakin besar pula mendapatkan rekomendasi partai untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Adapun calon legislatif misalnya, kontribusi ekonomi itu berlaku pasca memenangkan pemilihan dan berhasil menduduki jabatan legislatif.

Kontribusi ekonomi kepala daerah kepada partai politik dalam sistem politik saat ini masih dianggap niscaya, lantaran partai politik sesungguhnya tidak memiliki biaya operasional dan justru selama ini hanya mendapatkan subsidi dari pemerintah, itupun hanya dalam jumlah kecil di tingkat pusat. Hal ini sekaligus menyebabkan ongkos politik menjadi mahal dan implikasinya pada maraknya penangkapan aktor politik akibat terlibat dalam pusaran korupsi, sebagaimana juga telah diterangkan pada bab terdahulu.

### **2.3 Teori Pertukaran**

Akar teori pertukaran berasal dari behaviorisme dalam ilmu psikologi. Oleh karena itu, teori pertukaran familiar disebut sebagai sosiologi perilaku. Sosiologi perilaku memusatkan perhatian pada hubungan antara pengaruh perilaku seorang aktor terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap perilaku aktor. Bagi sosiolog perilaku, masa

lalu perilaku seseorang akan menentukan perilakunya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan mengetahui penyebab perilaku tertentu di masa lalu orang dapat meramalkan perilaku yang sama dalam situasi terkini.

Sosiologi perilaku sebagai reduksi ilmu psikologi tertarik pada hadiah (atau penguat) dan ongkos (atau hukuman). Hadiah ditentukan oleh kemampuannya memperkuat perilaku, sedangkan ongkos mengurangi kemungkinan perilaku. Gagasan tentang hadiah dan ongkos dalam behaviorisme inilah yang memengaruhi teori pertukaran.

Ada dua tokoh utama yang setidaknya sangat berpengaruh terhadap teori pertukaran, yakni George Casper Homans dan Peter Blau. Pandangan-pandangan kedua teoritikus tersebut selanjutnya dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. George Casper Homans

George Casper Homans dilahirkan di Boston – Amerika Serikat, 11 Agustus 1910 dan meninggal dunia 29 Mei 1989 di usia 78 tahun. Homans adalah sosiolog Amerika yang memelopori teori pertukaran sosial. Ragam pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Robert King Merton; Talcot Parson; Lawrence J. Handerson; Vilfredo Pareto; B.F. Skinner; Bernard DeVoto; Emile Durkheim, dan Elton Mayo.

Homans cukup populer di kalangan sosiolog kontemporer karena rumusannya tentang teori pertukaran dengan mengedepankan proposisi-proposisi yang bertumpu pada prinsip-prinsip ilmu psikologi. Oleh karenanya, Homans juga dianggap atau bahkan lebih sebagai seorang “reduksionis psikologi”. Namun demikian, teori pertukarannya dimaksudkan untuk menganalisa masyarakat maupun kelompok berdasarkan perilaku individual. Bagi Homans, individu tidak berada dalam keadaan terisolasi. Individu sebagai makhluk sosial menggunakan sebahagian besar waktunya untuk berinteraksi dengan individu lainnya.

Homans mengemukakan bahwa tindakan yang berkenaan dengan suatu kemauan yang mengakibatkan adanya suatu ganjaran dan hukuman bagi orang lain. Oleh karena

itu, pertukaran itu saling dapat menguntungkan atau sepanjang dianggap saling menguntungkan oleh kedua belah pihak. Homans mengembangkan beberapa proposisi yang mendasari pembentukan teori pertukarannya, yakni:

a. Proposisi Sukses (*the success proposition*)

Untuk semua tindakan yang dilakukan seseorang, semakin sering tindak khusus seseorang diberi hadiah, semakin besar kemungkinan orang melakukan tindakan itu. Ada beberapa hal yang ditetapkan Homans mengenai proposisi ini, yakni: Pertama, walaupun benar bahwa makin sering hadiah diterima menyebabkan makin sering tindakan dilakukan, namun hal ini bukan berarti berlangsung tanpa batas karena di saat-saat tertentu individu benar-benar tidak dapat bertindak seperti itu sesering mungkin. Kedua, makin pendek jarak waktu antara perilaku dan hadiah, makin besar kemungkinan orang mengulangi perilaku. Sebaliknya, makin lama jarak waktu antara perilaku dan hadiah, makin kecil kemungkinan orang mengulangi perilaku. Ketiga, pemberian hadiah secara intermiten lebih besar kemungkinannya menimbulkan perulangan perilaku ketimbang menimbulkan hadiah yang teratur. Hadiah yang teratur menimbulkan kebosanan dan kejenuhan, sedangkan hadiah yang diterima dalam jarak waktu yang tidak teratur sangat mungkin menimbulkan perulangan perilaku.

b. Proposisi Nilai (*the value proposition*)

Makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu. Apabila hadiah yang diberikan masing-masing kepada orang lain amat bernilai maka makin besar kemungkinan aktor melakukan tindakan yang diinginkan ketimbang jika hadiahnya tidak bernilai. Maknanya, jika hadiah itu bernilai positif maka makin besar pula kemungkinan melahirkan perilaku yang diinginkan. Sebaliknya, jika hukuman adalah bernilai negatif, maka makin besar pula kemungkinan aktor melakukan tindakan yang tidak diinginkan.

c. Proposisi Deprivasi – Kejemuan (*the deprivation – satiation proposition*)

Homans melihat bahwa rutusnya pemberian dan penerimaan hadiah memungkinkan hadiah itu menjadi tidak bernilai. Maka durasi waktu pemberian hadiah harus diatur secara proporsional agar tidak menimbulkan kejemuan. Oleh karena itu, Homans meletakkan konsep biaya dan keuntungan sebagai sesuatu yang dapat mengikat perulangan perilaku itu. Biaya tiap perilaku didefinisikan sebagai hadiah yang hilang karena tidak jadi melakukan tindakan yang direncanakan, sedangkan keuntungan dilihat sebagai hadiah yang lebih besar yang diperoleh atas biaya yang dikeluarkan.

d. Proposisi Persetujuan – Agresi (*the aggression – approval proposition*)

Dalam proposisi ini Homans mengembangkan dua kemungkinan konseptual yang mengacu pada emosi positif dan emosi negatif, yakni: Proposisi A: Bila tindakan orang tidak mendapatkan hadiah yang ia harapkan atau menerima hukuman yang tidak diharapkan, ia akan marah. Besar kemungkinan ia akan melakukan tindakan agresif dan akibatnya tindakan demikian makin bernilai baginya. Proposisi B: Bila tindakan seseorang menerima hadiah yang ia harapkan, terutama hadiah yang lebih besar daripada yang ia harapkan atau tidak menerima hukuman yang ia bayangkan, maka ia akan puas; ia makin besar kemungkinannya melakukan tindakan yang disetujui dan akibat tindakan seperti itu akan makin bernilai baginya.

e. Proposisi Rasionalitas (*the rationality proposition*)

Dalam memilih berbagai tindakan alternatif, seseorang akan memilih satu diantaranya yang dia anggap saat itu memiliki nilai (value) sebagai hasil dikalikan dengan probabilitas (kemungkinan) untuk mendapatkan hasil yang lebih besar. Proposisi ini bertujuan untuk memaksimalkan kegunaan dari satu alternatif tindakan yang dilakukan individu.

Mencermati kelima proposisi teori pertukaran Homans di atas, dapatlah disimpulkan bahwa individu dalam berlangsungnya proses interaksi sosial pada dasarnya adalah aktor yang mencari keuntungan dari tindakan-tindakan yang diwujudkannya.

## 2. Peter Michael Blau

Peter M. Blau dilahirkan di Austria, 7 Februari 1918 dan meninggal dunia 12 Maret 2002 di usia yang sudah uzur, 84 tahun. Pengalaman Blau sebagai kadet militer Amerika Serikat saat terjadinya Perang Dunia II sedikit banyak memengaruhi pemikirannya tentang sistem *reward* dan *punishmen* dalam teori pertukarannya. Jika teori pertukaran Homans menekankan individu sebagai aktor, teori pertukaran Blau justru bertujuan untuk memahami struktur sosial berdasarkan analisis proses sosial yang memengaruhi hubungan antara individu dan kelompok. Blau mengamati detail bagaimana cara kehidupan sosial tersusun menjadi struktur asosiasi yang kompleks. Menurut Blau, mekanisme yang menengahi antara struktur sosial yang kompleks itu adalah norma dan nilai (konsensus nilai) yang ada dalam masyarakat.

Kesepakatan bersama atas nilai dan norma yang digunakan sebagai media kehidupan sosial dan sebagai mata rantai yang menghubungkan transaksi sosial. Norma dan nilai memungkinkan pertukaran sosial tidak langsung dan menentukan proses integrasi dan diferensiasi sosial dalam struktur sosial yang kompleks dan menentukan perkembangan organisasi dan reorganisasi sosial di dalamnya.

Blau mengembangkan konsep pertukaran sosial pada tindakan yang tergantung pada reaksi pemberian hadiah dari orang lain, tindakan yang segera berhenti bila reaksi yang diharapkan tidak kunjung datang. Orang saling tertarik karena berbagai alasan yang membujuk untuk membangun kelompok sosial. Segera setelah ikatan awal dibentuk, hadiah yang saling mereka berikan akan membantu mempertahankan dan meningkatkan ikatan (Ritzer dan Goodman, 2007:369).

Bagi Blau, bila satu orang membutuhkan sesuatu dari orang lain, tetapi tidak memberikan apa pun yang sebanding sebagai tukarannya, maka akan tersedia empat kemungkinan. Pertama, orang itu dapat memaksa orang lain untuk membantunya. Kedua, orang itu akan mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga, orang itu dapat mencoba terus bergaul dengan baik tanpa mendapatkan apa yang dibutuhkannya

dari orang lain. Keempat, dan paling penting, orang itu mungkin akan menundukkan diri terhadap orang lain dan dengan demikian memberikan orang lain itu penghargaan yang sama dalam hubungan mereka.

## **2.4 Kerangka Konseptual**

Kajian sosiologi perilaku politik sebagai tema utama penelitian ini pada prinsipnya bertujuan untuk membangun penyelarasan antara konsep dan konteks praktik pertukaran sosial antara elit politik, partai politik, dan masyarakat sebagai pemilih yang saling bergantung satu sama lain dan senantiasa berada dalam situasi yang strategis, serta saling menguntungkan. Sebagaimana dijelaskan Homans dan Blau, bahwa setiap individu sebagai aktor menjalani kehidupan sosialnya dengan mewujudkan tindakan-tindakan yang selalu dianggap dapat mendatangkan keuntungan. Masing-masing aktor saling merelasikan diri dalam jaringan-jaringan pertukaran yang saling berhubungan, sehingga setiap pertukaran dalam satu hubungan akan memengaruhi pertukaran dalam hubungan yang lain.

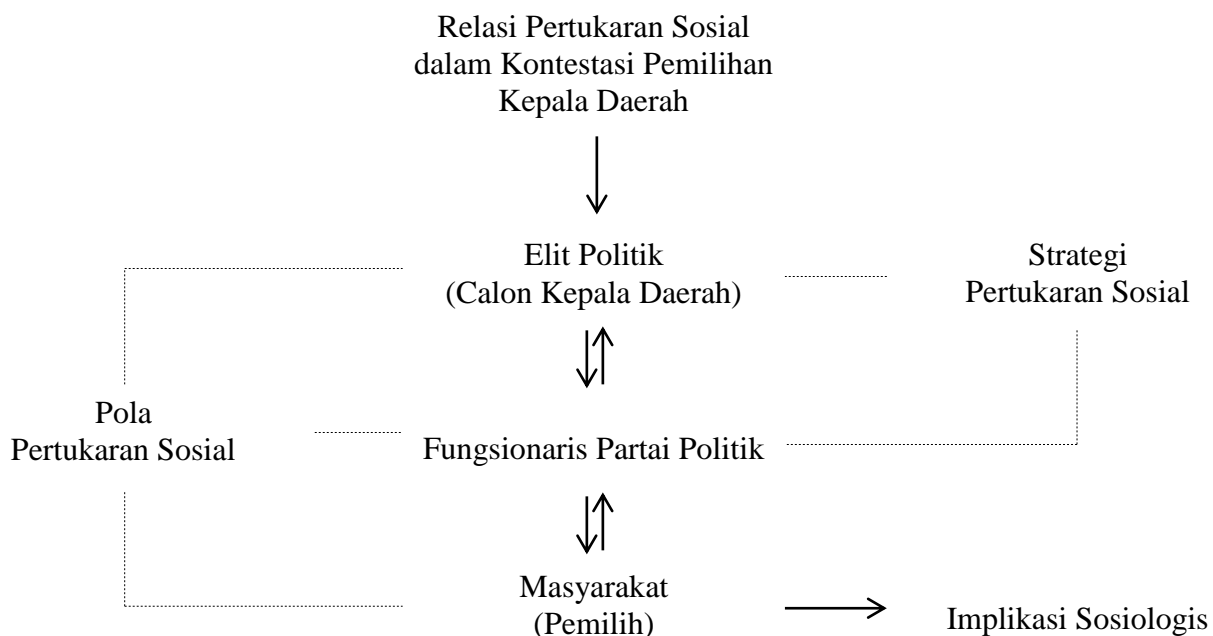
Realitas praktik pertukaran sosial dalam pemilihan kepala daerah adalah ekspresi budaya politik yang bertumpu pada jebakan imajinasi pemikiran bahwa potensi keterpihan politik untuk menduduki jabatan administrasi politik. Semakin besar kontribusi ekonomi calon kepala daerah kepada partai politik maka semakin besar pula potensi calon tersebut mendapat rekomendasi partai untuk maju dalam kontestasi politik. Selain itu, semakin besar biaya politik yang dikeluarkan calon kepala daerah juga akan semakin berpotensi mencapai kemenangan dengan mendulang suara signifikan dari masyarakat pemilih. Namun imajinasi pemikiran politik demikian itulah yang menyebabkan proses politik menjadi mahal.

Tidak dapat dipungkiri, tingginya biaya politik adalah kenyataan yang nyata dalam kontestasi politik pemilihan kepala daerah. Sistem perekrutan politik yang cenderung lebih menyemarakkan nuansa ekonomis ketimbang mewujudkan tujuan dan cita-cita yang sebenarnya dari politik yakni untuk menggerakkan dan meningkatkan

pembangunan serta kesejahteraan masyarakat pada akhirnya hanya mendistorsi tatanan politik, karena pasca keterpilihan/kemenangan banyak calon kepala daerah justru terjebak pada bagaimana modal awal yang dikeluarkan itu dapat dikembalikan beserta kelipatan keuntungannya. Di titik ini pula banyak kepala daerah kemudian masuk dalam pusaran kasus-kasus korupsi.

Pertukaran sosial terjadi bukan saja di tingkat elit politik dan partai politik, melainkan juga pada domain pemilih. Masyarakat hanya akan memberikan suaranya kepada calon kepala daerah tertentu apabila mendapat keuntungan ekonomi dan politik. Keuntungan ekonomi dan politik itu bukan saja terbatas pada konsep “serangan fajar” sebelum hari pemilihan sebagaimana umum terjadi di berbagai daerah, melainkan juga bentuk-bentuk lain dari keuntungan-keuntungan sosial budaya, ekonomi dan politik yang akan didapatkan masyarakat setelah calon kepala daerah terpilih.

Menariknya, walaupun apa yang dikemukakan Homans dan Blau dalam kaitan konteks penelitian ini dapat dimaknai secara jelas, tetapi hubungan dalam jaringan-jaringan pertukaran dalam praktik politik seringkali tidak dapat ditebak dan diramalkan mengingat proses politik begitu dinamis.





## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Paradigma dan Jenis Penelitian**

Penelitian tidak sekadar untuk mengidentifikasi dan memahami realitas pertukaran sosial elit politik melainkan juga untuk menemukan kebermaknaan di balik realitasnya, mengingat tren hubungan yang terbangun dalam pertukaran sosial itu umumnya bersifat pragmatis. Paradigma penelitian yang dianggap relevan untuk penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis terutama didasarkan pada asumsi ontologis bahwa realitas hubungan elit politik terbentuk sebagai hasil konstruksi sosial yang dijumpai oleh sistem nilai tertentu (*value of system*), bisa bersifat relatif atau tentatif sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapai. Penjelasan ontologis pertukaran sosial elit politik dapat ditelusuri pada derajat hubungan strukturasinya yang saling pengaruh memengaruhi berupa persaingan dan kerjasama.

Epistemologis paradigma konstruktivis dijumpai nilai transaksional subyektif secara hermeneutik dan dialektik antara peneliti dengan fenomena pertukaran sosial elit politik. Maksudnya, metodologi yang digunakan mengutamakan analisis komprehensif dan kontekstual untuk menemukan kebenaran dengan cara mengungkap kebenaran yang sesungguhnya di balik realitas yang terjadi. Karena metodologi penelitian ini menggunakan analisis komprehensif dan kontekstual maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif (Ratna, 2010).

Dengan demikian, konsekuensi aksiologisnya pada kontribusi wacana dan pengetahuan tentang masalah tersebut digunakan sebagai saluran dalam menentukan dan menyuarakan pilihan oleh semua pemangku kepentingan dalam satu momentum pemilihan umum kepala daerah di Provinsi Gorontalo khususnya, dan di Indonesia pada umumnya.

Penelitian ini mengkaji fenomena politik pemilihan kepala daerah dalam perspektif sosiologis. Dimensi politik ini pada dasarnya sosial terapan, dan umumnya menggunakan

jenis penelitian kualitatif karena akan memperkaya pendekatan dalam setting alamiah. Salah satu keunggulannya data-data temuan lapangan dapat diinterpretasi peneliti secara mendalam, mengingat setiap objek/subyek penelitian memiliki kekhasan yang perlu terdiskripsikan secara baik (kasuistik).

Auerbach dan Louis (Adil, 2016:43) mengemukakan beberapa karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: (1) paradigma kualitatif berfokus pada suara dari peserta/informan/partisipan (2) aktivitas penelitian diarahkan untuk menghasilkan hipotesis dan bukan untuk menguji hipotesis sehingga tercipta variasi pengalaman yang tidak universal, dan (3) adanya kolaborasi kemitraan antara peneliti dengan informan.

Untuk hal tersebut diperlukan cara-cara tertentu yang umum disebut metode. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak ada yang sempurna. Dibutuhkan kejelian peneliti untuk menggunakan metode yang tepat sesuai dengan karakteristik objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan dengan menggunakan metode komparatif. Bertujuan untuk membandingkan suatu objek untuk mengukur kualitasnya, karena tanpa perbandingan proses penilaian pada dasarnya tidak ada. Metode ini mengisyaratkan keseluruhan penelitian dilakukan dengan cara membandingkan, baik pada tataran objek yang digunakan sebagai tujuan penelitian maupun berbagai masalah yang timbul kemudian di lapangan.

Metode komparatif pada dasarnya bersifat *ex po facto* dimana pengumpulan data melalui kejadian yang sudah selesai. Walau kelemahan metode ini tidak mungkin mengetahui penyebab yang digunakan sebagai dasar pembanding karena tidak adanya kontrol terhadap variabel bebas. Namun demikian dapat diatasi dengan melipatgandakan argumentasi yang memungkinkan terjadinya hubungan kausal dan praduga-praduga dalam rangka penarikan kesimpulan (Ratna, 2010:333).

### 3.2 Fokus dan Lokus Penelitian

Mencermati permasalahan yang diajukan pada bab terdahulu, maka setidaknya ada tiga pokok persoalan yang perlu dianalisis, yakni proses pertukaran sosial elit; pengaruh elit terhadap pengurus partai politik dalam menentukan calon kepala daerah, dan dampak sosiologis pertukaran sosial elit terhadap pemilih (*voters*). Untuk menghindari bias interpretasi terhadap ketiga pokok masalah tersebut selanjutnya perlu dikemukakan batasan operasionalnya sebagai berikut:

1. Relasi pertukaran sosial elit politik adalah hubungan elit politik (calon kepala daerah), partai politik, dan pemilih dalam satu situasi strategis yang saling bergantung, saling membutuhkan, dan sama-sama saling menguntungkan sekaligus sebagai suatu upaya konsolidasi kekuatan untuk mencapai keterpilihan/kemenangan dalam momentum pemilihan umum kepala daerah.
2. Pola pertukaran sosial didasarkan pada sejumlah potensi kepemilikan sumberdaya elit baik figuritas, finansial, maupun kekuatan sosial yang menjadi bahan pertimbangan partai politik dalam menentukan dan memberikan restu/rekomendasi partai kepada pasangan calon kepala daerah.
3. Strategi pertukaran sosial adalah bagaimana elit politik memanfaatkan dan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai kemenangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.
4. Implikasi sosiologis adalah bagaimana interaksi sosial politik itu berlangsung dalam kehidupan masyarakat pasca pemilihan calon kepala daerah. Apakah masyarakat terkotak-kotak, menimbulkan gesekan dan bagaimana upaya meredusir potensinya.

Penelitian dilaksanakan di lingkup Provinsi Gorontalo dengan memilih 3 lokus utama, yakni Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Ketiga lokus ini sengaja dipilih dengan mempertimbangkan beberapa fakta sebagai berikut:

1. Di Provinsi Gorontalo terjadi praktik pertukaran sosial antara partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang berhubungan dengan aspek sosiologis politik serta dengan mempertimbangkan aspek risiko wilayah dan lingkungannya.
2. Provinsi Gorontalo memiliki 1 (satu) Kota dan 5 (lima) kabupaten yang sejak pemilihan umum kepala daerah tahun 2005 hingga tahun 2017 terindikasi kuat terjadi praktik pertukaran sosial dalam elit politik.
3. Dalam proses suksesi kepala daerah, partai politik memanfaatkan figur pasangan calon untuk mengukuhkan pengaruh politisnya untuk mendulang dukungan dari masyarakat (voters).
4. Pasangan calon kepala daerah, voters, dan partai politik tidak memiliki kedekatan hubungan baik secara ideologis maupun sosiologis.
5. Paradigma politik antara calon kepala daerah, voters, dan partai politik berorientasi pada pemanfaatan situasi strategis yang bersifat pragmatis untuk mencapai tujuan sesaat.

### **3.3 Data, Unit Analisis, dan Instrumen Penelitian**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini pada dasarnya berbentuk data-data deskriptif, eksplanatif, dan proyektif atau infografis yang dikumpulkan dari beberapa jenis kegiatan, yakni wawancara mendalam (indepth interview); dokumentasi, dan retrospektif (data lampau) dari sumber-sumber relevan dan terpercaya.

Adapun unit analisis yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah semua pemangku kepentingan yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan tipologi kepesertaan dari unsur-unsur: (1) pasangan calon kepala daerah yang mengikuti kompetisi pemilukada tahun 2017 (2) penyelenggara dan pengawas pemilukada, yakni KPU dan Bawaslu (3) pengurus partai politik peserta pemilukada, dan (4) masyarakat sebagai voters yang menentukan kemenangan calon kepala daerah.

Penelitian ini memposisikan peneliti sebagai *key instrument* dengan menggunakan alat bantu yang dapat mendukung dan memudahkan proses pengumpulan data dan pengorganisasian data untuk kepentingan analisis (Satori dan Komaria, 2010; Ratna, 2010).

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara Mendalam secara Tidak Terstruktur**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti dipandu instrumen kisi-kisi data dan sumber data agar mampu mengkonstruksi pertanyaan wawancara sesuai dengan tujuan perolehan data yang diinginkan dan tidak keluar darinya. Pertanyaan wawancara tidak perlu dibatasi dan dapat dimulai dari aspek apa saja sesuai respons informan sepanjang relevan dengan kebutuhan data. Frey (O'donoghue dan Punch, 2003:116) menegaskan bahwa teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas pelaku tanpa memaksakan suatu kategorisasi apriori yang mungkin mengarahkan dan membatasi penyelidikan.

Secara teknis, wawancara penelitian dilakukan berdasarkan kesediaan waktu dan tempat informan penelitian. Salah satu kendala yang dihadapi dalam melakukan wawancara khususnya kepada masyarakat sebagai pemilih adalah kerahasiaan identitas. Oleh karena itu, peneliti berupaya menyamarkan identitas informan dengan memberikan label khusus, misalnya A.1 untuk informan pertama, A.2 untuk informan kedua, A.3 untuk informan ketiga, dan seterusnya.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data-data sekunder, terutama dari sumber tertulis sebagai bahan informasi pustaka yang disajikan pada bab-bab terdahulu. Secara teknis dokumentasi dilakukan dengan cara: Pertama, mengumpulkan sumber tertulis dari media lokal cetak

maupun online yang menyoroti pertukaran sosial elit dalam pemilihan umum kepala daerah pada lokus penelitian. Kedua, mengorganisasikan informasi wawancara ke dalam bentuk catatan tertulis sehingga memudahkan peneliti untuk menelusuri kembali keterangan-keterangan yang sudah diberikan informan penelitian.

### **3. Retrospektif**

Sehubungan metode komparatif disasarkan pada upaya membandingkan dua situasi berbeda yaitu masa lalu sebagai sesuatu yang telah terlalui dalam pengumpulan data, dalam menggunakan kerangka acuan laporan hasil amatan lembaga survei maka kajian retrospektif sebagaimana dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan suatu pendekatan untuk memperoleh data yang bersumber dari masa lalu berupa foto, data/angka infografis, atau informasi dari berbagai sumber relevan dan terpercaya. Oleh karena itu, data yang dianggap paling relevan untuk memenuhi kebutuhan teknik ini adalah sumber tertulis dari media massa cetak, elektronik, maupun online dimana jejak-jejak data digital mudah diperoleh tanpa terikat ruang dan waktu.

Adapun data-data yang hendak diperoleh dari unit analisis data selanjutnya dapat dideskripsikan dalam bentuk kisi-kisi instrumen penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Matriks Data dan Sumber Data

Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
1 Deskripsi Umum <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wacana Pertukaran Sosial elit politik</li> <li>▪ Sistem Perundang-undangan Pemilukada</li> <li>▪ Gambaran Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Gorontalo tahun 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wawancara</li> <li>▪ Dokumentasi</li> <li>▪ Retrospektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat; Fungsionaris Parpol</li> <li>▪ Dokumen Perundang-undangan</li> <li>▪ Penyelenggara Pemilu</li> </ul>
2 Relasi pertukaran sosial: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Calon Kepala Daerah (elit) dengan partai politik</li> <li>▪ Calon kepala daerah dengan calon pemilih (voters)</li> <li>▪ Partai politik dengan partai politik</li> <li>▪ Partai Politik dengan calon pemilih (voters)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wawancara</li> <li>▪ Dokumentasi</li> <li>▪ Retrospektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elit politik (calon kepala daerah)</li> <li>- Fungsionaris partai politik</li> <li>- Penyelenggara pemilu</li> <li>- Masyarakat pemilih</li> </ul>
3 Pola pertukaran sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Modal Personal (Figuritas calon kepala daerah)</li> <li>▪ Modal Uang (Finansial)</li> <li>▪ Modal Sosial (Kekuatan sosial figur di masyarakat)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wawancara</li> <li>▪ Dokumentasi</li> <li>▪ Retrospektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elit politik (calon kepala daerah)</li> <li>- Fungsionaris partai politik</li> <li>- Penyelenggara pemilu</li> <li>- Masyarakat pemilih</li> </ul>
4 Strategi pertukaran sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memaksimalkan modal personal, uang, dan kekuatan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wawancara</li> <li>▪ Dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elit politik (calon kepala daerah)</li> <li>- Fungsionaris partai politik</li> </ul>
5 Implikasi sosiologis pertukaran sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Melemah/menguatnya ikatan sosial</li> <li>▪ Perubahan konstelasi politik di daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Wawancara</li> <li>▪ Retrospektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elit politik (calon kepala daerah)</li> <li>- Fungsionaris partai politik</li> <li>- Masyarakat pemilih</li> </ul>

### 3.5 Teknik Analisis Data

Analisis interdiskursif dimaksudkan untuk menguraikan perbedaan-perbedaan dan pertentangan (kontestasi) antara berbagai wacana (*discourse*) misalnya dalam perspektif ekonomi dan politik. Sedangkan analisis ektradiskursif bertujuan untuk dapat menjelaskan keterkaitan antara transformasi wacana (*discourse*) pada struktur sosial yang terkonstruksi.

Hasil analisis yang diharapkan dapat mengetahui pola kajian secara utuh, mendalam dan sistematis untuk dapat di sajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Setiap data yang di sajikan dilakukan dengan analisis interpretasi data, hubungan antar kategori dan simpulan pada setiap bagian.

### **3.6 Teknik Pengabsahan Data**

Menurut Satori dan Komariah (2010:164), penelitian kualitatif dapat dinyatakan sah apabila memiliki empat syarat, yaitu validitas internal/ *credibility*, valiitas eksternal/ *transferability*, kebergantungan/ *dependability*, dan objektivitas, kepastian/ *confirmability*. Namun demikian, dari keempat syarat tersebut hanya validitas internal (*credibility*) yang digunakan, dengan pertimbangan bahwa, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* dapat diberlakukan di saat yang sama, ketika hasil penelitian sudah dikemas dalam bentuk laporan penelitian.

Validitas internal (*Credibility*), yaitu ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang menggambarkan kecocokan antara konsepsi peneliti dengan hasil penelitian yang dicapai. Untuk mendukung validitas internal, maka tindakan yang dapat dilakukan peneliti secara khusus lebih ditekankan pada triangulasi sumber dan metode, untuk melihat relevansi data dan kebersinambungannya untuk kepentingan analisis interpretatif yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan kajian retrospektif.



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Politik Transaksional**

Wacana Politik Transaksional dalam pemilihan kepala daerah mendapat respon yang serius dan ditanggapi oleh elemen penguasa dalam menjalankan sebuah pegelaran pesta demokrasi yang diberi label pemilihan kepala daerah.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk politik transaksional seringkali menggunakan kekuasaannya untuk meloloskan salah satu unggulannya dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan temuan dalam wawancara penelitian bahwa dalam tahapan calon penentuan kepala daerah dilakukan dengan negosiasi antara partai pendukung dan elit partai dengan memanfaatkan kekuasaan elit partai untuk melakukan Politik transaksional.

Untuk mempengaruhi elit partai dalam mendukung calon kepala daerah dilakukan dengan berbagai macam cara langsung maupun tidak langsung sadar maupun tidak sadar bersaing dengan menggunakan cara-cara apapun untuk menarik dukungan elit partai sekaligus menarik simpati bagi warga pemilih.

Dalam politik transaksional tidak selamanya berlaku dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dalam bentuk barang maupun proyek jika calon kepala daerah yang di calonkan terpilih.

Berdasarkan temuan praktek politik transaksional sangat berpengaruh dalam menentukan calon kepala daerah karena selain bertransaksi dengan uang “tunai” juga dijanji-janjikan dengan proyek dan bagi-bagi kursi untuk pengisian jajaran kepala dinas di pemerintahan setempat.

### **4.2 Elit Partai (Aktor Politik)**

Calon kepala daerah yang telah ditentukan oleh elit partai memiliki strategi untuk mempengaruhi pemilih juga melakukan praktek transaksi politik dengan warga pemilih atau simpatisan partai. Calon Kepala Daerah bukan hanya bertransaksi dengan elit partai tetapi juga melakukan transaksi politik dengan para pemilih maupun simpatisan. Temuan di lapangan calon kepala daerah memiliki beban tersendiri bagaimana dia harus memenangkan pemilihan ini karena sudah melakukan transaksi politik dengan elit partai yang mencalonkannya. Strategi ini sangat ampuh untuk memenangkan pemilihan calon kepala daerah, karena masyarakat pemilih masih terpengaruh dengan nilai mata uang ketimbang melihat calon (pigur) kepala Daerah. Hal ini terbukti di lapangan bahwa calon kepala daerah yang memiliki kekuatan finansial masih sering memenangkan pertarungan calon kepala daerah.

### **4.3 Dampak Sosiologis**

Secara sosiologis pemilihan kepala daerah banyak menyita perhatian masyarakat pemilih. Hal ini terbukti dilapangan bahwa dimana calon kepala daerah yang mestinya mendapat dukungan dari partainya sendiri malah membuat skenario politik untuk meraih suara dimata calon pemilih kepala daerah. Calon kepala daerah pemilik partai A memberikan partainya kepada calon kepala daerah untuk di jadikan kendaraan politik untuk maju menjadi kepala daerah, sementara pemilik partai A, mencalonkan dengan partai B.

Fenomena ini terjadi pada pemilihan kepala daerah (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) di provinsi Gorontalo dan di kabupaten Bonebolango (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati). Pada pemilihan Gubernur “ Wakil Gubernur (Idris Rahim) adalah ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan partainya kepada Calon Kepala Daerah untuk di jadikan kendaraan politik untuk pemilihan kepala Daerah yang sama, dan “Idris Rahim” mencalonkan diri dengan partai Golkar,. Alhasil di menangkan oleh “Idris Rahim” sebagai calon kepala daerah terpilih, sementara kendaraan politiknya mengalami kekalahan. Demikian pula terjadi di pemilihan Bupati Wakil Bupati di Bone Bolango ( Azan Piola Isa dan Samsul) , juga mengalami nasib yang sama memberikan Partainya kepada calon kepala daerah lain, juga mengalami kekalahan.yang sama pula.

Skenario politik ini berdampak sosiologis pada masyarakat pemilih dalam menentukan calon kepala daerah, ini di karenakan simpatisan partai kadang memiliki ikatan emosional partai, kadang pula memiliki ikatan emosional pigur. Secara sosilogis, antara pigur dan partai sering bertolak belakang apalagi telah terjadi transaksi politik dalam pemilihan kepala daerah sehingga terjadi tekanan politik dalam bentuk doktrin partai maupun doktrin material.

## **BAB V. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sesuai metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai temuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Politik Transaksional berdasarkan tipologinya bergerak dalam konteks kedekatan calon kepala daerah dengan tokoh elit partai (Aktor Politik) dalam menentukan calon kepala daerah khususnya di Provinsi Gorontalo . Transaksi Politik Calon kepala daerah dengan pengurus partai politik (Elit Partai) mengakibatkan adanya kerjasama dalam hal menggunakan kekuasaannya sebagai elit partai untuk melakukan transaksional dalam pemilihan kepala daerah baik transaksi dalam bentuk “uang” tunai maupun barang bahkan janji-janji mendapatkan proyek yang dititipkan melalui dinas pemerintahan daerah.
2. Kedekatan elit partai politik terhadap warga (*voters*) dalam bentuk transaksional berpengaruh terhadap dukungan pada pemilihan kepala daerah.
3. Dampak sosiologis pada masyarakat dari praktek transaksional politik ini, khususnya bagi warga pemilih yang memiliki pengetahuan rendah tentang situasi dan keadaan politik mengalami dilematis dalam menentukan calon kepala daerah karena di pengaruhi oleh tekanan psikologis baik itu doktrinasi partai maupun secara material.

### **5.2 Saran :**

Temuan-temuan yang didapatkan dilapangan tentang peristiwa eksplorasi wacana Politik Transaksional berimbas pada Partai politik, Calon kepala Daerah dan pada warga (*voters*) pemilih. Dengan demikian peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Optimalisasi peran pemerintah, khususnya penyelenggara pemilihan umum untuk mengatur calon pemilihan kepala daerah baik melalui partai atau independen yang oleh undang-undang pemilu agar tidak terjadi politik transaksional .
2. Para elit partai agar tidak menjadikan calon kepala daerah sebagai sapi perah dalam melakukan praktek Politik Transaksional dalam menentukan calon kepala daerah, sehingga berpengaruh pada warga pemilih.
3. Politik Transaksional sudah harus dihentikan karna berdampak sosiologis pada warga untuk menentukan calon kepala daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nyarwi. 2012. *Manajemen Komunikasi Politik dan Marketing Politik. Sejarah, Perspektif, dan Perkembangan Riset*. Yogyakarta: Pustaka Zaman.
- Auerbach, F. Carl dan Silverstein, B. Louis. 2003. *Qualitative Data*. New York: New York University Press.
- Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan UGM.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik. Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, Afan. 1989. *Beberapa Aspek Pembangunan Politik – Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Rajawali Pers.
- O'Donoghue, Tom and Punch, Keith. 2003. *Qualitative Educational Research In Action*. London and New York: Routledge Falmer.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suseno, Frans Magnis. 1986. *Kuasa dan Moral*. Jakarta PT. Gramedia.
- Tabroni, Roni. 2014. *Marketing Politik. Media dan Pencitraan di Era Multipartai*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Jurnal dan Publikasi Ilmiah:**
- Blais, Andre & Nadeau, Richard. 1992. *The Electoral Budget Cycle*. Researchgate Publication Number 316674211.
- Breder, Adi & Drazen, Allan. 2004. *Political Budget Cycle in New Versus Established Democracies*. National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 10538. New York.
- Rogoff, Kenneth. 1987. *Equilibrium Political Budget Cycle*. National Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 2428. New York.
- Fitriyah. 2015. *Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)*. Jurnal Politika, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015. Hal. 101 – 111.
- Hidayat, Syarif, dkk. 2018. *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada*. Publikasi Penelitian. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah – Lembaga Ilmu Pegetahuan Indonesia.

Haliim, Wimmy. 2013. *Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013*. Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. 2 (2) 2017. Hal. 201 – 226.

Razaqtiar, Arief Zaafril. 2016. *Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono – Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013*. Jurnal Politik Muda, Vol. 5. No. 3, Agustus – Desember 2016. Hal. 353 – 361.

Shi, Min & Svensson, Jakob. 2006. *Political Budget Cycle: Do they differ across countries and why?*. Journal of Public Economics 90 (2006) 1367 – 1389. Elsevier.

Muhtadi, Burhanuddin. 2013. *Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi antara “Party-ID” dan Patron-Klien*. Jurnal Penelitian Politik. Volume 10. No. 1 Juni 2013. Hal. 41 – 58.

#### **Disertasi, Tesis, Makalah, dan Sumber Relevan:**

Adil, Deden Marrah. 2016. *Politik Ekologi dan Strategi Livelihood Masyarakat Kawasan di Kabupaten Buton*. Proposal Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Rachim, Abdullah. 2017. Disertasi. Tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

Upe, Ambo. 2016. *Kontestasi Wacana Kesejahteraan dan Masyarakat Risiko dalam Arena Pertambangan Emas di Kabupaten Bombana*. Disertasi. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Makassar.

#### **Media Pemberitaan Online:**

\_\_\_\_\_. <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/20541571/la-nyalla-kesal-dimaki-prabowo-soal-uang-rp-40-m-fadli-zon-sebut>

\_\_\_\_\_. <https://travel.kompas.com/read/2013/12/12/1709332/Survei.Kedekatan.dengan.Parpol.Rendah.Politik.Uang.Tinggi>

\_\_\_\_\_. <https://www.wartasultra.id/2018/03/01/asrun-dan-adriatma-dwi-putra-menjadi-tersangka-kasus-suap/>

\_\_\_\_\_. <https://nasional.tempo.co/read/1067833/polda-kpk-temukan-uang-suap-diduga-untuk-adriatma-dwi-putra>

\_\_\_\_\_. <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/16/15520931/ditangkap-kpk-berapa-jumlah-harta-bupati-bengkulu-selatan>

\_\_\_\_\_. <https://news.detik.com/berita/4053247/bupati-purbalingga-ditangkap-kpk-ini-laporan-kekayaannya>

\_\_\_\_\_. <https://www.antaranews.com/berita/720053/pdip-akan-beri-dampungan-hukum-wali-kota-blitar>

\_\_\_\_\_. <https://www.merdeka.com/politik/prabowo-mau-usaha-susah-kredit-nggak-dikasih-terpaksa-minta-bantuan-rakyat.html>

\_\_\_\_\_. [.https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180625192234-12-308920/ketua-gerindra-lampung-akui-terima-rp15-miliar-dari-cagub?utm\\_campaign=cnnsocmed&utm\\_medium=cpc&utm\\_source=facebook&utm\\_content=ctw](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180625192234-12-308920/ketua-gerindra-lampung-akui-terima-rp15-miliar-dari-cagub?utm_campaign=cnnsocmed&utm_medium=cpc&utm_source=facebook&utm_content=ctw)

\_\_\_\_\_. [. https://id.wikipedia.org/wiki/Peter\\_Blau](https://id.wikipedia.org/wiki/Peter_Blau). Online. Diakses tanggal 26 Juli 2018.

\_\_\_\_\_. [. https://id.wikipedia.org/wiki/George\\_Homans](https://id.wikipedia.org/wiki/George_Homans). Online. Diakses tanggal 26 Juli 2018.